



Program Pembangunan berbasis Masyarakat Fase II: Implementasi Institusionalisasi Pembangunan Mata Pencarian yang Lestari untuk Masyarakat Papua

Tujuan:	Untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas, khususnya masyarakat asli Papua melalui pemberdayaan sistem dan proses dasar pemerintah lokal dan masyarakat madani bagi pembangunan mata pencarian yang lestari di Papua.
Agensi Pelaksana:	Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) and Program PBB untuk Pembangunan (UNDP)
Mitra Utama:	■ Kepala pemerintah provinsi dan kabupaten/kota ■ Badan Perencanaan Daerah Provinsi Papua dan Papua Barat ■ Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi tingkat Provinsi ■ Universitas Negeri Papua Barat (UNIPA) di Provinsi Papua Barat dan Universitas Cendrawasih (UNCEN) di Provinsi Papua ■ Organisasi Komunitas Lokal dan Organisasi Berbasis Komunitas ■ Bank Indonesia dan Bank lokal ■ Kamar Dagang dan Industri (KADIN), Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Serikat Pekerja ■ Dewan Perwakilan Rakyat Papua ■ Media massa setempat
Jangka Waktu:	1.5 tahun (2012 - 2013)
Cakupan Geografis:	Provinsi Papua dan Papua Barat
Acuan Program untuk Indonesia:	Target ketenagakerjaan dalam Perencanaan Jangka Menengah diperkuat oleh kebijakan dan program yang menegaskan pertumbuhan ketenagakerjaan dan pengembangan usaha yang berpihak pada kaum miskin.
Donor:	 New Zealand's International Aid & Development Agency
Anggaran:	USD 685,865.00
Kontak	Tauvik Muhamad Staf ILO tauvik@ilo.org Sinthia Dewi Harkrisnowo Koordinator Proyek Lokal sinthia@ilo.org

Latar Belakang Proyek

'Tanah Papua' yang terbagi atas provinsi Papua dan Papua Barat, merupakan pulau terbesar di Indonesia yang memiliki populasi yang paling kecil dengan 3.6 juta penduduk, dengan lebih dari 250 kelompok etnis dan suku bangsa (Sensus BPS 2010) dan sedikitnya 73% dari masyarakat aseli Papua tinggal di perdesaan.

Meski wilayah Papua dianugerahkan oleh kekayaan alam yang besar, akan tetapi tingkat kemiskinannya dua kali lipat tingkat kemiskinan rata-rata nasional dan merupakan yang tertinggi dengan 34.88% untuk Provinsi Papua Barat dan 36.80% untuk Papua. Provinsi Papua dan Papua Barat juga tertinggal dibandingkan dengan provinsi lainnya untuk indikator Tujuan Pembangunan Milenium (MDG) non-pendapatan.

Tingkat partisipasi bersih pendidikan dasar sekitar 90% untuk Papua Barat dan 76.09% untuk Papua (lebih rendah dari tingkat partisipasi nasional yang berkisar 95.23%). Ketidaksetaraan gender khususnya dalam komunitas tradisional yang patriarkal adalah sangat kuat, terutama dalam hal (a) akses yang terbatas bagi perempuan atas sumber daya dan pengambilan keputusan, serta (b) pembagian kerja berbasis gender. Situasi ini dimaknai sebagai akses yang terbatas bagi kaum muda aseli dan perempuan Papua untuk memperoleh mata pencaharian yang layak.

Untuk mempercepat proses pengembangan sumber daya manusia di Papua, Pemerintah Indonesia memberikan status otonomi khusus (OTSUS). Implementasi penuh dari OTSUS masih ditunda, akibat rendahnya partisipasi masyarakat madani dan terbatasnya kapasitas dan koordinasi antara institusi-institusi pemerintah pusat, provinsi dan distrik, yang mengakibatkan ketidaktersediaan kerangka kerja yang inklusif bagi pengembangan mata pencaharian yang lestari.

Tujuan dan Sasaran Proyek

Proyek akan memberikan kontribusi bagi hasil Proyek Pembangunan berbasis Masyarakat Fase 2 (PcDP2): "Peningkatan kesejahteraan komunitas, khususnya masyarakat aseli Papua melalui pemberdayaan proses dan sistem dasar pemerintah lokal dan masyarakat madani untuk pengembangan mata pencaharian di daerah Papua"

Intervensi yang diusulkan akan melengkapi keluaran lain dari proyek PCDP2, yaitu pendekatan partisipatif dalam menyusun kebijakan dan perencanaan-perencanaan, peningkatan pelaksanaan yang meningkat untuk layanan kesehatan dan pendidikan, mekanisme koordinasi yang meningkat untuk program pembangunan di daerah Papua.

Proyek akan memfokuskan pada peningkatan kapasitas dari pemangku kepentingan yang sudah ada, termasuk masyarakat aseli Papua sebagai penerima manfaat untuk memperoleh akses atas mata pencaharian yang

lebih baik melalui tiga komponen-komponen kegiatan yang terkait meliputi:

- (i) Mendukung pengembangan usaha lokal di Papua dan Papua Barat;
- (ii) Memfasilitasi akses untuk keuangan bagi kelompok usaha mikro yang diseleksi;
- (iii) Mendirikan pusat pengembangan usaha mikro/ inisiatif inkubasi usaha;

Penerima Manfaat

Penerima manfaat utama proyek adalah pemangku kepentingan dan komunitas khususnya masyarakat aseli Papua yang berlokasi di 10 kabupaten di Papua dan Papua Barat;

Kegiatan-kegiatan utama

Dengan referensi pengalaman dan pembelajaran serta jejaring lokal dan mitra yang dikembangkan melalui intervensi proyek ILO terdahulu dalam mengimplementasi aktivitas mata pencaharian pada proyek-proyek PIPE (Pemberdayaan Masyarakat Asli Papua), EAST (Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan) dan ESD (Pengembangan Keterampilan Kewirausahaan) di Papua, aktivitas utama proyek meliputi:

- ♦ Memfasilitasi ketertarikan kelompok-kelompok usaha terseleksi dengan institusi potensial yang dapat memberikan ketrampilan teknis untuk menghasilkan produk-produk bernilai tambah (pemrosesan produksi lanjutan);
- ♦ Melakukan pelatihan pengembangan usaha mikro, manajemen keuangan dan pemasaran;
- ♦ Memetakan bank-bank publik dan swasta serta institusi keuangan lainnya untuk memberikan dukungan keuangan mikro;
- ♦ Melakukan penilaian kelayakan atas akses untuk dukungan keuangan;
- ♦ Menilai institusi yang telah ada serta kapasitasnya untuk pengembangan usaha;
- ♦ Melakukan studi tentang kebutuhan pengusaha mikro perempuan;
- ♦ Memformulasikan metodologi yang jelas, program dan kurikulum pelatihan untuk mendukung pengembangan usaha;
- ♦ Menjalankan analisis pemetaan atas rantai penawaran dan rantai nilai (*value and supply chain*); dan
- ♦ Melakukan percontohan pusat pengembangan usaha di kabupaten terpilih.

Kantor ILO Jakarta

Menara Thamrin Lantai 22
Jl. M.H. Thamrin Kav. 3, Jakarta 10250
Telp. +62 21 391 3112 | Faks. +62 21 310 0766
E-mail: jakarta@ilo.org | Website: www.ilo.org/jakarta

